

2. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN

Secara khusus Fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan di tingkat Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) daerah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, APIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun ada sebagian program pada urusan pemerintahan bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya. Pada tahun 2018 secara nomenklatur urusan per program pada RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 yang dilaksanakan melalui RKPD tahunan, pada tahun 2018 fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan selain dilaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP daerah, juga dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonosobo.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021, fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan mendukung pencapaian visi misi ke 2 yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk melaksanakan fungsi lain urusan pemerintahan bidang pengawasan, pemerintah kabupaten Wonosobo melalui APBD tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp8.177.972.304,00** atau sebesar 0,39% dari Total APBD Kabupaten Wonosobo **Rp2.072.393.505.735,00**. Dari total alokasi anggaran digunakan untuk mendanai belanja langsung **Rp3.373.628.760,00** dan belanja tidak langsung **Rp4.804.343.544,00**. Capaian program fungsi pengawasan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.F.2.1
Capaian Program Fungsi Pengawasan Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	3.373.628.760,00	3.279.362.871,00	97,21%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.788.370.000,00	1.779.326.504,00	99,49%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	247.258.760,00	246.459.057,00	99,68%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000,00	83.263.019,00	97,96%
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.253.000.000,00	1.170.314.291,00	93,40%
	Belanja Tidak Langsung	4.804.343.544,00	4.464.962.378,00	92,94%
1	Belanja Pegawai	4.804.343.544,00	4.464.962.378,00	92,94%

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2018 (diolah)

Dari tabel diatas alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai fungsi pengawasan, proporsi terbesar ada di belanja tidak langsung Rp4.804.343.544,00, yaitu untuk belanja pegawai Inspektorat yang berjumlah 38 orang, sedangkan belanja langsung

Rp3.373.628.760,00. Belanja langsung ini terdiri dari 4 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan oleh perangkat daerah Inspektorat, sedangkan untuk program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diampu oleh tiga perangkat daerah, yaitu Inspektorat, Bagian Pengendalian Pembangunan dan Bagian Organisasi Setda.

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari total anggaran belanja langsung, proporsi terbesar tahun 2018 masih digunakan untuk mendanai program rutin yaitu program pelayanan administrasi perkantoran Rp1.788.370.000,00 atau sebesar 53,01%. Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang mendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Sedangkan kegiatan rutin yang sifatnya mendukung fungsi pengawasan yaitu kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan untuk fasilitasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat serta untuk menunjang jabatan fungsional APIP. Dari alokasi anggaran program pelayanan administrasi perkantoran Rp1.788.370.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp1.779.326.504,00 atau 99,49%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja APIP, sarana dan prasarana aparatur perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar. Untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur diwujudkan melalui kegiatan pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki maupun pengadaan sarana dan prasarana dan peralatan kantor yang belum memadai. Dari alokasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp247.258.760,00 dapat terealisasi sebesar Rp246.459.057,00 atau 99,68%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

APIP memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Pada tahun 2018 ada 9 APIP kabupaten yang dikirim untuk mengikuti diklat. Dari alokasi anggaran program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp85.000.000,00 dapat terealisasi Rp83.263.019,00 atau sebesar 97,96%.

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH terkait dengan pencapaian indikator fungsi lain urusan pemerintahan

IV.F.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

bidang pengawasan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas Internal (APIP kabupaten) ataupun Pengawas Eksternal (Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP dan BPK Perwakilan Jawa Tengah).

Program tersebut bertujuan untuk meminimalisir indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan oleh Inspektorat dan 2 kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan dan Bagian Organisasi Setda. Kegiatan pada program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH diantaranya adalah;

a) Gelar Pengawasan Daerah

Gelar pengawasan daerah, dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas Internal (APIP Kabupaten) maupun Pengawas Eksternal (Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP dan BPK Perwakilan Jawa Tengah). Gelar pengawasan daerah dilaksanakan 2 periode yaitu pada bulan Juli 2018 dan Desember 2018. Untuk periode 1 berupa Gelar Pengawasan Desa (Larwasdes) dilaksanakan di 8 kecamatan 129 desa yaitu kecamatan Leksono, Kalibawang, Mojotengah, Garung, Kejajar, Watumalang, Wonosobo dan Kepil, sedangkan periode 2 dilaksanakan pada bulan Desember 2018 untuk perangkat daerah se Kabupaten Wonosobo.

b) Asistensi/ Pendampingan

Inspektorat selaku APIP Kabupaten tahun 2018 melaksanakan Pendampingan/ Asistensi. Pendampingan/ asistensi yang dilakukan oleh APIP pada tahun 2018 diantaranya pendampingan terhadap Pemeriksaan Aparat, Penegak Hukum, Pengawas Eksternal, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus, Pendampingan audit investigasi kasus dengan metode studi komprehensif. Kegiatan ini dalam rangka meminimalisir penyimpangan penyelenggaraan pembangunan daerah serta pelayanan publik terutama indikasi tindak pidana korupsi dengan mengefektifkan tim saber pungli.

c) Peningkatan Maturitas SPIP bagi OPD

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, pada tahun 2018 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pendampingan/asistensi terhadap perangkat daerah dalam rangka mencapai level 3 Maturitas SPIP : Integrated (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern). Ada 17 Perangkat daerah yang mendapat asistensi Inspektorat.

d) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, pemahaman APIP terhadap pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan. Hal ini disebabkan indikasi pelanggaran sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa.

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap barang dan jasa, pada tahun 2018 Inspektorat mengadakan kegiatan sosialisasi tentang barang dan jasa selama 3 hari dengan melibatkan 38 APIP Inspektorat Kabupaten Wonosobo dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

e) Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja dengan BPK/BPKP

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian SDM APIP dalam melaksanakan pengawasan berbasis kinerja serta sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP menuju level 3 : Integrated (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern). Selain itu juga untuk meningkatkan SDM APIP sebagai saksi ahli. Bentuk kegiatan dilaksanakan melalui Workshop Audit Berbasis Kinerja dan Workshop TOT Mediasi Hukum.

f) Studi Komprehensif Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya APIP Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan fungsi Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Studi komprehensif dilaksanakan melalui kunjungan dengan metode pembelajaran kepada daerah lain yang lebih maju dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintahan daerahnya. Lokasi studi komprehensif tahun 2018 adalah ke APIP Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

g) Review yang dilaksanakan oleh Inspektorat

Pada tahun 2018 kegiatan review yang dilaksanakan oleh Inspektorat diantaranya review laporan keuangan OPD, Review dan Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan review terhadap dokumen perencanaan seperti RKPD, renja, KUA/PPAS, RKA dan review PAPBJDD.

Kegiatan Review laporan keuangan perangkat daerah pada tahun 2018 dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga diharapkan status opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat dipertahankan.

Review dan Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan untuk menilai kesesuaian, mengukur dan mengevaluasi atas Kinerja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo terhadap dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja serta menilai dan mengukur Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017.

Review juga dilakukan terhadap dokumen perencanaan seperti RKPD, RKA, PAPBJDD untuk menilai dan mengevaluasi kesesuaian antara dokumen RPJMD, RKPD dengan Renstra/Renja perangkat daerah dan kesesuaian Tupoksi perangkat daerah untuk mendukung capaian pembangunan yang efektif, efisien dan

ekonomis.

Pada tahun 2018, Inspektorat juga telah melaksanakan review terhadap hasil sensus aset, tujuannya untuk memberikan keyakinan pada publik tentang kondisi aset setelah disensus.

h) Review yang dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Setda

Dalam hal pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, bagian Pengendalian Pembangunan Setda pada tahun 2018 telah melaksanakan review/pemantauan terhadap penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Review ini dimaksudkan untuk memantau progres baik secara fisik maupun keuangan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta untuk menggali permasalahan dan alternatif pemecahan masalah selama pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan review ini bertujuan agar perangkat daerah dapat melaksanakan program kegiatan lebih tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan sehingga target capaian output kegiatan maupun target program yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai.

i) Penguatan SAKIP/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi Setda, Kabupaten Wonosobo setiap tahun melaksanakan kegiatan penguatan SAKIP. Bentuk kegiatan penguatan SAKIP pada tahun 2018 berupa penyusunan LKjIP dan penyusunan aplikasi e-SAKIP serta sosialisasi e-SAKIP.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2017 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lkjip disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LkjIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo memuat tentang analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. LKjIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Relevan dengan hal tersebut, pada tahun 2018 telah dikembangkan SAKIP berbasis elektronik atau E-SAKIP. E-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas

IV.F.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang digunakan Untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada umumnya. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi E-Sakip ini dapat diakses oleh publik, dengan harapan masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo bila terdapat perangkat daerah yang kinerjanya kurang maksimal.

Selain kegiatan tersebut di atas, agar penyusunan dokumen SAKIP perangkat daerah tepat waktu, Bagian Organisasi Setda melakukan fasilitasi penyusunan dokumen SAKIP perangkat daerah. Fasilitasi berupa pendampingan penyusunan dokumen SAKIP perangkat daerah dari perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan kinerja dan pengoordinasian pemenuhan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

Dari alokasi program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Rp1.253.000.000,00 tersebut, dapat terealisasi Rp1.170.314.291,00 atau sebesar 93,40%.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.F.2.2

Target dan Realisasi Kinerja Fungsi Pengawasan Tahun 2017-2018 terhadap RKPD Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018			Status capaian	Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi capaian 2018		
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK	%	Internal 73,42% Provinsi 91,81% BPK 69,13%	82,71%	Internal 87,22% Provinsi 93,10% BPK 98,43%	105%	0	100%
2	Level APIP		2	1	2	200%	0	2
3	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	%	2,13	40%	36,17%	90,43%	◇	100%

Sumber: Inspektorat, 2018 (diolah)

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

IV.F.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Dari tabel IV.F.2.2 capaian kinerja fungsi pengawasan berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 yang tertuang dalam RKPD tahunan, pada tahun 2018 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK menunjukkan capaian sesuai dengan target/ telah tercapai yaitu Internal 87,22%, APIP Provinsi Jawa Tengah 93,10% dan BPK 98,43%, dengan realisasi capaian 105% melebihi target capaian, namun masih ada 1,57% temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

Untuk indikator level APIP capaian 2018 sudah tercapai pada level 2 (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi). Sedangkan untuk indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP dari target RPJMD yang tertuang dalam RKPD tahun 2018 sebesar 40%, tercapai 36,17% atau 17 perangkat yang sudah menerapkan SPIP. Masih ada sekitar 3,83% atau sekitar 31 perangkat daerah yang belum menerapkan SPIP.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan antara lain:

Tabel IV.F.2. 3
Matriks Permasalahan dan Solusi Fungsi Pengawasan

No	Permasalahan	Solusi
1	Temuan terhadap penyelenggaraan pemerintahan masih cukup banyak	Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian sehingga dapat meminimalisir temuan.
2	Masih ada temuan hasil pemeriksaan APIP internal maupun eksternal yang belum ditindaklanjuti	- Peningkatan pemahaman pentingnya tindak lanjut hasil temuan terhadap bisnis proses pemerintahan daerah - Bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyelesaian temuan yang belum ditindaklanjuti yang menyebabkan kerugian APBD maupun kerugian negara
3	Penerapan SPIP di OPD masih rendah	Pendampingan/ asistensi kepada perangkat daerah terhadap pentingnya SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan terus ditingkatkan